Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)
Vol. 2, No. 1, February 2026
Page: 40 - 48

Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah

Rulli Kristiani[1*], Kristian H.P. Lambe[2], Mika Malissa[3]
[1,2,3]Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail: rullikristiani01@gmail.com[1]
[*]Penulis korespondensi

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah dalam mendukung kinerja pelayanan perizinan dan investasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pejabat struktural dan pelaksana teknis yang terlibat langsung dalam siklus pengelolaan anggaran, serta analisis dokumen keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural pengelolaan anggaran telah mengikuti siklus APBD dan memanfaatkan sistem informasi keuangan pemerintah. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum optimal, yang tercermin dari realisasi anggaran yang belum sepenuhnya mencapai target, keterlambatan pelaksanaan kegiatan strategis, serta adanya kesenjangan persepsi antara perencana dan pelaksana anggaran. Faktor pendukung efektivitas meliputi kejelasan perencanaan program, dukungan pimpinan, kompetensi sebagian SDM, dan pemanfaatan aplikasi SIPD. Sebaliknya, faktor penghambat utama meliputi keterbatasan kapasitas SDM, dinamika kebijakan, keterlambatan pencairan dana, serta lemahnya evaluasi anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini merekomendasikan penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem informasi keuangan, serta penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan internal guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran di lingkungan DPMPTSP.

Kata kunci: efektivitas anggaran; pengelolaan anggaran; DPMPTSP; keuangan daerah; pelayanan publik.

Abstract
This study examines the effectiveness of budget management at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Central Papua Province in supporting licensing and investment services. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews with structural officials and technical staff directly involved in the budget management process, complemented by analysis of financial and administrative documents. The findings indicate that, procedurally, budget management has complied with the regional budget cycle and utilized government financial information systems. However, its practical effectiveness remains suboptimal. This condition is reflected in budget realization that has not fully met planned targets, delays in the implementation of strategic programs, and discrepancies in perceptions between budget planners and implementers. Supporting factors include clear program planning, leadership commitment, adequate competencies of selected personnel, and the use of the SIPD financial system. Conversely, key constraints consist of limited human resource capacity, policy dynamics, delayed fund disbursement, and weak performance-based budget evaluation. This study recommends strengthening data-driven budget planning, enhancing human resource capacity, optimizing financial information systems, and reinforcing internal evaluation and supervision mechanisms to improve budget management effectiveness at DPMPTSP.

Keywords: *budget effectiveness; budget management; DPMPTSP; local government finance; public service.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran merupakan instrumen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi kinerja. Dalam sektor publik, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian, evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban kepada publik (Mardiasmo, 2018 ; Paembonan et al., 2024). Sejalan dengan paradigma *performance-based budgeting*, efektivitas pengelolaan anggaran diukur dari sejauh mana anggaran mampu mendukung pencapaian output dan outcome program pemerintah (Robinson & Last, 2019).

Pada tingkat pemerintah daerah, tuntutan efektivitas pengelolaan anggaran semakin menguat seiring dengan desentralisasi fiskal dan penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menyerap anggaran secara optimal, tetapi juga memastikan bahwa belanja publik benar-benar menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan dan pembangunan daerah (World Bank, 2020). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa persoalan klasik seperti rendahnya realisasi anggaran, keterlambatan pelaksanaan program, serta lemahnya evaluasi berbasis kinerja masih menjadi tantangan utama di banyak organisasi perangkat daerah (OPD) (Lewis & Hendrawan, 2019; Udayanti & Werastuti, 2025).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Efektivitas kinerja DPMPTSP sangat bergantung pada dukungan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, tepat waktu, dan berorientasi hasil. Di daerah otonom baru seperti Provinsi Papua Tengah, tantangan pengelolaan anggaran menjadi semakin kompleks karena adanya keterbatasan kapasitas fiskal, penataan kelembagaan yang masih berlangsung, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Hasil evaluasi internal dan temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan anggaran DPMPTSP Provinsi Papua Tengah telah mengikuti mekanisme formal siklus APBD dan memanfaatkan sistem informasi keuangan pemerintah (SIPD RI), efektivitas pelaksanaannya belum optimal. Kondisi ini tercermin dari realisasi anggaran yang belum mencapai target, keterlambatan pelaksanaan kegiatan strategis, serta adanya perbedaan persepsi antara perencana dan pelaksana anggaran. Fenomena tersebut sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa kepatuhan prosedural tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas kinerja anggaran (Petrina et al., 2023; Medea et al., 2024; Pidjer et al., 2025).

Untuk memperjelas fenomena penelitian, berikut disajikan ringkasan data dan fakta pendukung yang relevan dengan isu efektivitas pengelolaan anggaran pada DPMPTSP Provinsi Papua Tengah.

Tabel 1. Fenomena Pengelolaan Anggaran pada DPMPTSP Provinsi Papua Tengah

Aspek	Kondisi Empiris
Perencanaan anggaran	Telah mengikuti RPJMD, RKPD, dan KUA–PPAS
Realisasi anggaran	Belum mencapai target, terutama pada kegiatan strategis
Ketepatan waktu	Terdapat keterlambatan pelaksanaan program tertentu
Sistem informasi	Menggunakan SIPD RI, namun belum optimal
SDM pengelola anggaran	Kompetensi dasar memadai, tetapi masih perlu peningkatan
Evaluasi dan pengawasan	Dilakukan, namun belum sepenuhnya berbasis kinerja

Penelitian ini penting dilakukan karena efektivitas pengelolaan anggaran merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan daerah, khususnya di sektor perizinan dan investasi. Pada konteks Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru, ketidakefektifan pengelolaan anggaran berpotensi menghambat percepatan pelayanan, menurunkan kepercayaan investor, serta melemahkan akuntabilitas pemerintah daerah. Secara akademik, penelitian ini mengisi celah penelitian (*research gap*) terkait efektivitas pengelolaan anggaran pada DPMPTSP di wilayah dengan karakteristik transisi kelembagaan, yang masih relatif terbatas dalam literatur manajemen publik dan keuangan daerah di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan urgensi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas pengelolaan anggaran pada DPMPTSP Provinsi Papua Tengah?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran?

TINJAUAN LITERATUR

Pengelolaan Anggaran Sektor Publik

Pengelolaan anggaran sektor publik merupakan rangkaian proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan sumber daya keuangan negara atau daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menerjemahkan kebijakan publik ke dalam program dan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, kualitas pengelolaan anggaran menjadi determinan utama kinerja organisasi perangkat daerah.

Seiring dengan perkembangan paradigma administrasi publik, pengelolaan anggaran tidak lagi berorientasi pada input semata, tetapi diarahkan pada pencapaian kinerja dan hasil (*results-oriented budgeting*). Pendekatan ini menekankan keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, serta outcome yang diharapkan (Robinson & Last, 2019). Dalam praktiknya, pemerintah daerah di Indonesia telah mengadopsi pendekatan anggaran berbasis kinerja melalui berbagai regulasi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis.

Anggaran Berbasis Kinerja dan Good Governance

Anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) bertujuan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik dengan mengaitkan anggaran pada indikator output dan outcome yang terukur (Setiawati et al., 2025). Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kualitas pengambilan keputusan anggaran (OECD, 2020). Dalam kerangka *good governance*, pengelolaan anggaran yang efektif harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi penggunaan sumber daya publik (UNDP, 2019).

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah sering kali masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya digunakan sebagai alat manajerial untuk pengendalian dan evaluasi kinerja (Lewis & Hendrawan, 2019). Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kepatuhan prosedural dengan capaian kinerja aktual, sebagaimana juga ditemukan dalam pengelolaan anggaran di DPMPTSP Provinsi Papua Tengah.

Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Efektivitas pengelolaan anggaran merujuk pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penggunaan anggaran. Robbins dan Judge (2017) mendefinisikan efektivitas sebagai derajat pencapaian hasil yang diinginkan oleh organisasi. Dalam konteks anggaran publik, efektivitas tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, serta dampak program terhadap pelayanan publik.

Indikator efektivitas pengelolaan anggaran umumnya meliputi tingkat realisasi anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kesesuaian penggunaan anggaran dengan rencana, serta pencapaian output dan outcome program (Mahmudi, 2021). Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang tinggi tidak selalu mencerminkan efektivitas apabila tidak diikuti dengan capaian kinerja yang signifikan (World Bank, 2020). Oleh karena itu, evaluasi efektivitas harus dilakukan secara komprehensif dan berbasis kinerja.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Efektivitas pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal organisasi. Dari sisi internal, kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor krusial dalam menentukan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. SDM yang memiliki pemahaman regulasi, kemampuan teknis, serta pengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah cenderung menghasilkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif (Rahman & Supriyadi, 2020).

Selain SDM, kualitas perencanaan anggaran dan koordinasi antarunit kerja juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas

anggaran. Perencanaan yang tidak realistis atau kurang berbasis data sering kali menyebabkan deviasi antara rencana dan realisasi anggaran (Halim & Kusufi, 2021). Dari sisi eksternal, dinamika kebijakan pemerintah pusat, keterlambatan pencairan dana, serta perubahan prioritas pembangunan daerah turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran di tingkat OPD.

Peran Sistem Informasi Keuangan Pemerintah

Pemanfaatan sistem informasi keuangan pemerintah, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), merupakan upaya strategis untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pengawasan anggaran (Sari & Putra, 2022).

Namun demikian, efektivitas pemanfaatan sistem informasi sangat bergantung pada kesiapan SDM dan dukungan organisasi. Tanpa kompetensi teknis yang memadai dan komitmen pimpinan, sistem informasi keuangan berpotensi hanya menjadi alat administratif tanpa kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja anggaran (Petrina et al., 2023).

Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan anggaran pada DPMPTSP di berbagai daerah menunjukkan hasil yang relatif konsisten, yaitu bahwa efektivitas anggaran masih dipengaruhi oleh tingkat penyerapan, kapasitas SDM, serta kualitas perencanaan dan pengawasan (Udayanti & Werastuti, 2025; Medea et al., 2024). Namun, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada daerah yang relatif stabil secara kelembagaan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini menempatkan DPMPTSP Provinsi Papua Tengah sebagai objek penelitian dalam konteks daerah otonom baru yang sedang mengalami proses penataan kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris baru dalam memahami bagaimana dinamika transisi institusional memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran sektor publik.

Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran merupakan hasil interaksi antara faktor regulasi, kapasitas SDM, kualitas perencanaan, sistem informasi, serta kepemimpinan organisasi. Literatur juga menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan anggaran berbasis kinerja dengan praktik implementasinya di tingkat OPD. Oleh karena itu, analisis efektivitas pengelolaan anggaran pada DPMPTSP Provinsi Papua Tengah menjadi relevan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan memberikan rekomendasi berbasis konteks empiris.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, dinamika, serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah. Desain deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi empiris secara sistematis dan faktual berdasarkan perspektif para aktor yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran (Creswell & Poth, 2018).

Pendekatan ini dinilai relevan karena efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya dapat diukur melalui angka realisasi, tetapi juga melalui pemahaman terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat struktural yang terlibat dalam proses pengelolaan anggaran pada DPMPTSP Provinsi Papua Tengah. Mengingat karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman data, penentuan informan tidak dilakukan secara acak.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi anggaran. Informan penelitian meliputi:

1. Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Tengah;
2. Pejabat struktural yang membidangi perencanaan dan keuangan;
3. Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan staf yang terlibat dalam pengelolaan anggaran.

Penggunaan purposive sampling sejalan dengan rekomendasi dalam penelitian kualitatif yang menekankan pemilihan informan kunci (*key informants*) untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam (Etikan et al., 2016).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah, yang berkedudukan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada peran strategis DPMPTSP sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelayanan perizinan dan fasilitasi investasi, serta pada konteks Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru yang masih berada dalam fase penataan kelembagaan.

Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu Oktober hingga Desember 2025, yang mencakup proses pengumpulan data, verifikasi informasi, serta analisis data penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. **Wawancara mendalam**, dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk menggali informasi terkait proses pengelolaan anggaran, kendala yang dihadapi, serta upaya peningkatan efektivitas anggaran.
2. **Studi dokumentasi**, meliputi penelaahan dokumen perencanaan dan keuangan, seperti DPA, laporan realisasi anggaran, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan.
3. **Observasi terbatas**, dilakukan untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai praktik pengelolaan anggaran dan mekanisme kerja di lingkungan DPMPTSP.

Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk meningkatkan validitas temuan melalui triangulasi sumber dan metode (Miles et al., 2019).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti tahapan analisis interaktif, yang meliputi:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data hasil wawancara dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian;
2. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar-temuan;
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu interpretasi data secara berkelanjutan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan konsisten.

Model analisis ini memungkinkan peneliti melakukan analisis secara simultan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir (Miles et al., 2019). Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan konfirmasi ulang kepada informan (*member checking*) untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan anggaran di DPMPTSP Provinsi Papua Tengah. Karakteristik responden disajikan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang dan posisi strategis informan dalam struktur organisasi.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

No	Jabatan Informan	Jumlah	Masa Kerja
1	Kepala DPMPTSP	1 orang	>10 tahun
2	Pejabat struktural (Bidang Perencanaan/Keuangan)	2 orang	5–10 tahun
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2 orang	3–7 tahun
4	Staf pengelola anggaran	2 orang	2–5 tahun
Total		**7 orang**	

Sumber: Data hasil wawancara (2025)

Komposisi informan tersebut dinilai memadai untuk menggali informasi secara mendalam karena mencerminkan keterlibatan dari tingkat pengambil kebijakan hingga pelaksana teknis anggaran.

Ringkasan Hasil Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali persepsi informan mengenai efektivitas pengelolaan anggaran, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan. Ringkasan temuan wawancara disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara Informan

Aspek	Temuan Utama
Perencanaan anggaran	Telah mengacu pada dokumen perencanaan daerah, namun belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil
Pelaksanaan anggaran	Terdapat keterlambatan pelaksanaan kegiatan strategis
Realisasi anggaran	Penyerapan belum optimal pada beberapa program prioritas
Sistem informasi	SIPD digunakan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal
SDM pengelola anggaran	Kompetensi dasar memadai, tetapi masih memerlukan peningkatan
Evaluasi anggaran	Dilakukan, namun belum sepenuhnya berbasis kinerja

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain formal pengelolaan anggaran dan praktik implementasinya di tingkat operasional.

Analisis Tematik

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik, dengan mengidentifikasi pola-pola makna dari hasil wawancara dan dokumentasi. Proses analisis menghasilkan beberapa tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian.

Tabel 4. Hasil Analisis Tematik

Tema Utama	Subtema	Indikator Temuan
Efektivitas pengelolaan anggaran	Perencanaan	Kesesuaian program dengan kebutuhan
	Pelaksanaan	Ketepatan waktu dan koordinasi
	Realisasi	Tingkat penyerapan anggaran
Faktor pendukung	Kepemimpinan	Dukungan pimpinan terhadap program
	Sistem	Penggunaan SIPD
Faktor penghambat	SDM	Keterbatasan kompetensi teknis
	Kebijakan	Dinamika regulasi dan pencairan dana
Upaya perbaikan	Kapasitas SDM	Pelatihan dan pendampingan
	Evaluasi	Penguatan evaluasi berbasis kinerja

Sumber: Hasil penelitian (2025)

Hasil analisis tematik ini menjadi dasar dalam pembahasan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Pembahasan

Efektivitas Pengelolaan Anggaran DPMPTSP Provinsi Papua Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada DPMPTSP Provinsi Papua Tengah secara prosedural telah mengikuti ketentuan siklus APBD dan memanfaatkan sistem informasi keuangan pemerintah. Namun demikian, efektivitasnya belum optimal. Temuan ini menjawab rumusan masalah pertama, bahwa efektivitas pengelolaan anggaran masih menghadapi kendala pada tahap pelaksanaan dan realisasi anggaran.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas anggaran tidak cukup dinilai dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari pencapaian hasil dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil studi Lewis dan Hendrawan (2019) yang menunjukkan bahwa kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan masih menjadi masalah umum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini mengidentifikasi bahwa faktor pendukung efektivitas pengelolaan anggaran meliputi kejelasan perencanaan program, dukungan pimpinan, serta pemanfaatan SIPD. Sebaliknya, faktor penghambat utama adalah keterbatasan kapasitas SDM, keterlambatan pencairan anggaran, serta lemahnya evaluasi berbasis kinerja.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahman dan Supriyadi (2020) yang menekankan peran kompetensi SDM dalam menentukan kualitas pengelolaan anggaran sektor publik. Selain itu, Petrina et al. (2023) juga menegaskan

bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan tanpa didukung kapasitas SDM yang memadai cenderung tidak menghasilkan peningkatan kinerja anggaran yang signifikan.

Upaya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Berkaitan dengan rumusan masalah ketiga, penelitian ini menemukan bahwa DPMPTSP Provinsi Papua Tengah telah melakukan berbagai upaya perbaikan, seperti peningkatan koordinasi internal, pemanfaatan sistem informasi keuangan, serta evaluasi program secara berkala. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka evaluasi anggaran berbasis kinerja.

Hasil ini menguatkan argumen Robinson dan Last (2019) bahwa keberhasilan anggaran berbasis kinerja sangat bergantung pada konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Dalam konteks daerah otonom baru, penguatan kapasitas SDM dan sistem evaluasi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran pada DPMPTSP Provinsi Papua Tengah belum sepenuhnya tercapai meskipun telah didukung oleh kerangka regulasi dan sistem informasi yang memadai. Kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi menjadi isu sentral yang perlu mendapat perhatian serius. Temuan ini tidak hanya menjawab seluruh rumusan masalah penelitian, tetapi juga memperkuat kontribusi empiris studi ini dalam konteks pengelolaan anggaran pada daerah otonom baru.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan anggaran secara prosedural telah mengikuti ketentuan siklus APBD dan memanfaatkan sistem informasi keuangan pemerintah, efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran masih menjadi isu utama dalam mendukung kinerja pelayanan perizinan dan investasi.

Temuan penelitian mengungkap bahwa efektivitas pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal organisasi. Dukungan pimpinan, kejelasan perencanaan program, serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berperan sebagai faktor pendukung utama. Sebaliknya, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dinamika kebijakan, serta keterlambatan pencairan anggaran menjadi faktor penghambat yang memengaruhi ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaan program.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil dan kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola anggaran, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan output dan outcome yang selaras dengan tujuan organisasi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran sektor publik tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbasis kinerja. Studi ini juga memberikan kontribusi empiris dalam konteks pengelolaan anggaran pada daerah otonom baru, yang masih relatif terbatas dalam literatur manajemen publik dan keuangan daerah di Indonesia.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas pada satu organisasi perangkat daerah, sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, penelitian ini belum mengintegrasikan analisis kuantitatif kinerja anggaran secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, memperluas objek penelitian pada OPD lain atau lintas daerah, serta mengkaji hubungan antara efektivitas pengelolaan anggaran dan kinerja pelayanan publik secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dori, H. P., Lambe, K. H. P., & Sabandar, S. Y. (2025). ANALISIS DAMPAK SISTEM PELAYANAN KAS DAERAH ONLINE TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH DI BANK PAPUA KANTOR CABANG UTAMA NABIRE. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, *1*(1), 27–34. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/853

Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5*(1), 1–4. https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2021). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi terbaru). Salemba Empat.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*. Kemendagri RI.

Lewis, B. D., & Hendrawan, A. (2019). Performance-based budgeting in Indonesian local governments: Evidence from the public sector. *Public Budgeting & Finance, 39*(2), 3–22. https://doi.org/10.1111/pbaf.12202

Mahmudi. (2021). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi revisi). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi Offset.

Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *2*(1), 45–51. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

OECD. (2020). *Performance budgeting in OECD countries*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/2f8e9c6b-en

Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, *2*(2), 1–6. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254

Panggalo, A., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo : Peran Sistem LPSE Dalam Meningkatkan Proses Pengadaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(2), 70–78. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/992/824

Petrina, R., Nugroho, R., & Wicaksono, A. (2023). Government financial information systems and budget performance: Evidence from local governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 35*(3), 345–362. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2022-0041

Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 50–58. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308

Rahman, F., & Supriyadi. (2020). Human resource capacity and budget implementation effectiveness in local government. *Journal of Accounting and Investment, 21*(2), 234–248. https://doi.org/10.18196/jai.2102144

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson Education.

Robinson, M., & Last, D. (2019). *A basic model of performance-based budgeting*. International Monetary Fund.

Sari, N. P., & Putra, I. M. (2022). The role of financial information systems in enhancing budget accountability. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Publik, 6*(2), 89–102.

Setiawati, L., Todingbua, M. A., & Halik, J. B. (2025). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. *Scientific Journal of Economics, Management,*

Business, and Accounting, *15*(1), 141–155. https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5342

Udayanti, N. P. M., & Werastuti, D. N. S. (2025). Determinants of budget effectiveness in regional government organizations. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 10*(1), 1–15.

UNDP. (2019). *Governance principles and public financial management*. United Nations Development Programme.

World Bank. (2020). *Subnational public financial management performance assessment*. World Bank Publications.